



Judul : Ramai Kasus KDRT, Perempuan Banyak Yang Jadi Korban
Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Ramai Kasus KDRT Perempuan Banyak Yang Jadi Korban

KETUA DPR Puan Maharani menyoroti maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Indonesia. Dia meminta aparat kepolisian menindak tegas semua pelaku KDRT dan kekerasan terhadap perempuan juga anak.

"Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan hal serius yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah dan aparat penegak hukum. Tidak ada toleransi atau *zero tolerance* untuk pelaku KDRT dan tindak kekerasan, khususnya kepada perempuan dan anak. Harus disanksi dengan tegas sesuai hukum yang berlaku," ungkap Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/8/2024).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat, terdapat 15.459 kasus kekerasan sejak awal hingga pertengahan tahun 2024. Sebanyak 13.436 kasus dialami oleh perempuan dan 3.312 oleh laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi kasus tertinggi.

Sementara, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat sepanjang tahun 2023 ada 401.975 kasus kekerasan. Terbaru, kasus KDRT menimpa selebgram Cut Intan Nabila yang dilakukan oleh suaminya, Amor Toreador.

"Keprihatinan mendalam atas kekerasan yang lagi-lagi menimpa perempuan. Walaupun korban KDRT bisa terjadi pada siapa saja, tapi perempuan yang paling banyak menjadi korban," ujar politisi PDI-Perjuangan ini.

Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu menyoroti respons cepat pihak kepolisian dalam menangkap suami Cut Intan, tak sampai 24 jam dari video

diposting dan pelaporan korban.

"Kita apresiasi gerak polisi yang cepat menangkap pelaku dan memberikan perlindungan pada korban. Kita berharap gerak cepat aparat juga ditunjukkan untuk semua korban kekerasan, maupun bagi kasus-kasus hukum lainnya," tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.

Dengan begitu, keadilan dapat tercipta bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa harus menunggu kasus viral terlebih dahulu. "Fenomena *no viral no justice* seperti yang saya sampaikan sebelumnya harus diminimalisir," tandas Puan.

Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menambahkan, kasus Cut Intan Nabila menjadi pengingat bahwa sebenarnya kepolisian bisa bertindak cepat dan efektif dalam penegakan hukum. "Kita harapkan tidak hanya untuk kasus viral saja Polisi melakukan aksi cepat," tuturnya.

Gilang menekankan kecepatan aksi kepolisian juga harus dilakukan pada semua kasus KDRT yang dialami masyarakat. Dia juga menyinggung soal fenomena *no viral no justice* seperti yang disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani beberapa waktu lalu.

Penanganan kasus yang cepat itu adalah hak setiap korban, bukan hak istimewa yang bergantung pada perhatian media atau publik. Aparat penegak hukum dan Pemerintah harus memastikan bahwa semua kasus ditangani dengan respons yang konsisten dan adil, tanpa menunggu viral.

"Jangan hanya bergerak cepat hanya pada isu yang mendapatkan sorotan media atau publik. Ini juga termasuk kasus-kasus lainnya, tak hanya KDRT, dan bukan hanya untuk Polri, tapi berlaku untuk semua penegak hukum," imbuhnya. ■ KAL